

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari pemaparan pembahasan hasil penelitian pada BAB III, maka penulis menarik kesimpulan bahwa :

Kinerja DPRD Provinsi Jambi Priode 2014 – 2019 sebagai pembuat kebijakan secara umum cukup baik dalam beberapa aspek. Kinerja DPRD Provinsi Jambi Priode 2014 – 2019 sebagai pembuat kebijakan dapat dilihat pada indikator pengukuran kinerja responsivitas, resposibilitas, dan akuntabilitas.

- A. Responsivitas DPRD Provinsi Jambi Priode 2014 – 2019 baik dengan melaksanakan tugas mendengarkan aspirasi masyarakat daerah dengan menampung aspirasi masyarakat.
- B. Resposibilitas DPRD Provinsi Jambi Priode 2014 – 2019 dalam melaksanakan tugas sudah baik tidak ada melanggar tata tertib dewan, Sisi buruknya berkaitan dengan etika dewan yaitu kasus korupsi yang berkaitan dengan RAPBD.
- C. Akuntabilitas DPRD Provinsi Jambi Priode 2014 – 2019 belum maksimal tetapi sudah cukup baik dengan menghasilkan Peraturan Daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Peraturan Daerah No 02 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dinilai dari dua aspek responsivitas dan akuntabilitas DPRD Provinsi Jambi Priode 2014 - 2019

- A. Responsivitas sangat baik karena DPRD Provinsi Jambi Priode 2014 - 2019 dengan cepat bergerak membuat Peraturan Daerah sesuai dengan Permasalahan alam dan masyarakat.
- B. Akuntabilitas cukup baik karena dalam pembuatan Peraturan daerah No 02 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dengan maksimal mengundang para pihak yang paham masalah kebakaran huan seperti LSM WALHI, BNPB.

4.2. SARAN

Untuk DPRD Provinsi Jambi Priode 2019 - 2024 harus lebih baik dalam menjalankan tugas fungsi dan wewenang dalam membuat kebijakan, kekurangan serta kesalahan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jambi Priode 2014 – 2019 adalah sebagai pembelajaran untuk meningkatkan lagi kinerja sebagai pembuat kebijakan.

Meningkatkan kinerja DPRD Provinsi Jambi Priode 2019 - 2024 dalam membuat kebijakan perlu melakukan beberapa hal berikut ini

- A. Responsivitas dalam sisi ini DPRD Provinsi Jambi Priode 2019 -2024 harus lebih peka dan menampung semua aspirasi masyarakat daerah provinsi jambi dari sebelas kabupaten dan kota.
- B. Resposibilitas dala sisi ini DPRD Provinsi Jambi Priode 2019 - 2024 dituntut benar untuk mematuhi aturan tata tertib dalam membuat kebijakan sehingga menghasilkan kebijakan yang berkualitas.

C. Akuntabilitas sisi ini DPRD Provinsi Jambi Priode 2019 – 2024 dituntut memiliki kesadaran untuk lebih bertanggung jawab dengan membuat kebijakan sesuai dengan RAPERDA bahkan lebih baik jika melebihi dari RAPERDA asalkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.